



RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PETERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa hewan ternak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat banyak sehingga perlu untuk diarahkan pemanfaatan dan pengelolaannya melalui perlindungan peternak guna mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan;
  - b. bahwa perlindungan terhadap peternak merupakan satu kesatuan dalam upaya menjaga ketahanan pangan, menghasilkan produk ternak yang berkualitas aman, sehat, utuh dan halal, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan;
  - c. bahwa perlindungan peternak dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten guna memberikan kepastian hukum;
  - d. berdasarkan huruf a, b dan c di atas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungan peternak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perlindungan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, meningkatkan daya saing serta kesejahteraan Peternak.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan

lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.

10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
14. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
15. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat yang digunakan untuk pengembangbiakan.
16. Lahan penggembalaan umum adalah lahan yang disediakan Pemerintah Daerah atau hasil hibah oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala mikro dan kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
17. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
18. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

20. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
21. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha penggemukan atau ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
23. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
24. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun produk hewan.
25. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan
27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
28. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
29. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

30. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
31. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
32. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
34. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
35. Menteri adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia

## Pasal 2

- (1) Asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan antara lain:
  - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
  - b. keamanan dan kesehatan;
  - c. kerakyatan dan keadilan;
  - d. keterbukaan dan keterpaduan;
  - e. kemandirian;
  - f. kemitraan; dan
  - g. keprofesionalan.
- (2) Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan:
  - a. Sebagai dasar adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan peternak.

- b. Memberikan adanya jaminan dalam pemenuhan hak perlindungan peternak guna untuk menghasilkan ternak berkualitas dengan standar aman, sehat, utuh dan halal.
  - c. Terselenggaranya peternakan yang sehat, mandiri, berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Tujuan pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan antara lain:
- a. Untuk mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.
  - b. Mencukupi kebutuhan peternak dalam upaya agar berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah.
  - c. Melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan.
  - d. Mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat.
  - e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Akses Pembiayaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi;
- b. Pelayanan Peternakan;
- c. Kegiatan Usaha Peternakan;
- d. Kemitraan Peternak;
- e. Panen, Pasca Panen, Pengelolaan dan Pemasaran;
- f. Pemberian Informasi Harga Ternak;
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;
- h. Hak dan Kewajiban Peternak; dan
- i. Sanksi Administratif.

BAB III  
AKSES PEMBIAYAAN, PERMODALAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI  
DAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Akses Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan akses pembiayaan bagi Peternak di Daerah untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Lembaga perbankan;
  - b. Lembaga keuangan non-bank; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah;
- (3) Bantuan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemberian informasi pembiayaan;
  - b. Pemberian rekomendasi; dan/atau
  - c. Pendampingan dalam pengajuan pembiayaan.

Pasal 5

Bantuan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan persyaratan dasar antara lain:

- a. Peternak merupakan penduduk Daerah;
- b. Lokasi peternakan berada di Daerah dan tidak boleh dipindahkan;
- c. Kegiatan usaha peternakan telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Memiliki kelengkapan perizinan bidang peternakan;
- e. Legalitas kelompok peternak terdaftar di Dinas;

- f. Membuat proposal permohonan yang memuat sekurang-kurangnya profil usaha peternakan dan rencana anggaran;
- g. Termasuk kategori usaha Mikro dan Kecil;
- h. Persyaratan lain yang dipersyaratkan sesuai sumber pembiayaan atau permodalan.

## Bagian Kedua

### Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

#### Pasal 6

- (1) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi Peternak dan menjamin hasil peternakan yang berkualitas.
- (2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Benih/bibit;
  - b. Pakan;
  - c. Alat dan mesin;
  - d. Budidaya;
  - e. Panen dan pascapanen;
  - f. Pengelolaan dan pemasaran hasil;
  - g. Kesehatan hewan; dan/atau
  - h. Kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Bupati mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang berdampak pada peningkatan kompetensi Peternak serta menjamin kualitas hasil peternakan.

Bagian Ketiga  
Akses Informasi

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas menyediakan informasi pengembangan usaha peternakan bagi Peternak di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. harga komoditas hasil peternakan;
  - b. prasarana dan sarana peternakan;
  - c. data kebutuhan pangan Daerah dan nasional;
  - d. peluang dan tantangan pasar;
  - e. perkiraan populasi dan produksi;
  - f. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - g. teknologi peternakan;
  - h. peta penyebaran penyakit hewan;
  - i. rencana tata ruang wilayah;
  - j. kelembagaan peternak; dan
  - k. informasi lain yang dibutuhkan bagi Peternak di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Media elektronik;
  - b. Media cetak; dan
  - c. Media lain yang mudah serta cepat diakses oleh Peternak.

BAB IV  
PELAYANAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pelayanan peternakan untuk Peternak terdiri atas:
  - a. Penetapan dan pengelolaan kawasan peternakan;

- b. Penyediaan dan pengembangan benih/bibit unggul dan/atau bakalan;
  - c. Penyelamatan ternak ruminansia betina produktif;
  - d. Penyediaan pengembangan sumber daya genetik ternak; dan
  - e. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan ternak.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukkan Peternakan dan Potensi Peternakan.
- (3) Proses penetapan kawasan peruntukkan peternakan dan potensi peternakan wajib memperhatikan kemampuan daerah dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Penetapan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

#### Pasal 9

- (1) Penetapan dan pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari kawasan usaha peternakan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat persyaratan teknis:
- a. bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk hewan;
  - b. tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai; dan
  - c. tersedia prasarana peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dan potensi daerah, produksi dalam negeri serta kemampuan ekonomi kerakyatan.

- (2) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan tindakan pengendalian dan pengawasan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat laik benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri keunggulan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai karantina hewan.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan pengembangan sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik dapat dilakukan dengan kegiatan budi daya dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik dapat dilakukan dengan konservasi dalam habitat dan/atau luar habitatnya.
- (4) Kegiatan budidaya dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kesejahteraan hewan.

#### Pasal 13

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.

- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
  - a. agen penyakit hewan, vektor, reservoir penyakit hewan;
  - b. induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
  - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
  - d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup
- (3) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Otoritas Veteriner yang berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.

## Bagian Kedua

### Asuransi

#### Paragraf 1

#### Asuransi Ternak

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha ternak yang dilakukan oleh Peternak dalam bentuk asuransi ternak.
- (2) Perlindungan usaha ternak dalam bentuk asuransi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Asuransi ternak yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ternak ruminansia; dan
  - b. ternak non-ruminansia;
- (4) Asuransi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melindungi Peternak dari kerugian akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial;

- c. serangan hama dan penyakit hewan;
  - d. dampak perubahan iklim;
  - e. pencurian komoditas Peternakan;
  - f. kematian karena melahirkan; dan/atau
  - g. kematian karena kecelakaan.
- (5) Perlindungan usaha ternak dalam bentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Asuransi ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi setiap Peternak untuk menjadi peserta asuransi ternak.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Peternak dan perusahaan asuransi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk pembayaran premi asuransi ternak kepada Peternak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Asuransi Ketenagakerjaan Peternak

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Peternak kecil dan/atau Peternak yang berisiko tinggi.

- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. Jaminan kematian.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kemudahan akses pendaftaran sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak;
  - b. sosialisasi kepada Peternak; dan/atau
  - c. bantuan premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan subsidi premi asuransi ternak dan premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### KEGIATAN USAHA PETERNAKAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha Peternakan

#### Pasal 18

- (1) Jenis usaha peternakan yang dilakukan oleh Peternak terdiri atas:
  - a. usaha budi daya; dan
  - b. usaha pembibitan.
- (2) Usaha budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, dan/atau pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah melalui Dinas.

- (4) Setiap usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan berusaha.

#### Pasal 19

- (1) Jenis usaha peternakan dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.
- (2) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu, dan di atas skala usaha tertentu.
- (3) Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi skala usaha mikro dan skala usaha kecil.
- (4) Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi skala usaha menengah dan besar.
- (5) Klasifikasi skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang perizinan berusaha.

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Perizinan Bagi Peternak

#### Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas memberikan fasilitasi dukungan kemudahan bagi Peternak dalam pengurusan perizinan bidang Peternakan.
- (2) Fasilitasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Peternak skala mikro dan kecil.
- (3) Fasilitasi dukungan kemudahan bagi Peternak dalam pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
- a. Pemberian akses informasi secara transparan dan mudah diakses melalui media elektronik dan cetak;
  - b. Pemberian sosialisasi teknis dan bimbingan teknis penyusunan dokumen; dan

- c. Pendampingan dalam pengajuan dan perbaikan dokumen administratif melalui sistem *Online Single Submission*;
  - d. Kemudahan penerbitan dokumen;
  - e. Pendampingan pemenuhan standar teknis.
- (4) Bentuk fasilitasi dukungan kemudahan bagi Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan dokumen:
- a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk lahan peternakan;
  - d. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
  - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan/atau
  - f. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (5) Dinas dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan DPMPSTSP.

### Bagian Ketiga

#### Pakan Ternak

#### Pasal 21

- (1) Setiap Peternak yang melakukan budidaya wajib untuk mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

### Bagian Keempat

#### Alat Mesin Peternakan

#### Pasal 22

- (1) Alat mesin peternakan digunakan untuk memenuhi fungsi:
- a. perbibitan dan budidaya;
  - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan;

- c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memenuhi Standar Nasional Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Kesesuaian serta memberikan pedoman penggunaan, keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan wajib memiliki izin usaha Alat dan Mesin Peternakan.
- (4) Dalam rangka mendukung alat mesin Peternakan, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa:
- a. Penyediaan sarana pasca panen;
  - b. Pelatihan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan alat dan mesin.
- (5) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Budi Daya

#### Pasal 23

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

#### Pasal 24

- (1) Usaha budi daya meliputi:
- a. Ternak ruminansia; dan
  - b. Ternak nonruminansia.

- (2) Usaha budi daya ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diprioritaskan Daerah meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri.
- (3) Usaha budi daya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diprioritaskan Daerah meliputi kuda, kelinci, dan unggas.

#### Bagian Keenam

#### Peningkatan Kewirausahaan Peternak

#### Pasal 25

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan kegiatan untuk meningkatkan kewirausahaan Peternak.
- (2) Kegiatan untuk meningkatkan kewirausahaan Peternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penyuluhan;
  - c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan Peternak.

#### Bagian Ketujuh

#### Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan perlindungan kepada Peternak dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perjanjian yang merugikan Peternak; dan/atau
  - b. penyalagunaan posisi dominan dalam kemitraan usaha.
- (3) Pemberian perlindungan kepada Peternak dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. koordinasi lintas sektor dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); dan/atau
  - b. melakukan klarifikasi dan mediasi antara peternak dengan perusahaan peternakan atau pihak terkait yang terlibat.

## Bagian Kedelapan

### Penggunaan Obat oleh Peternak dalam Kegiatan Usaha Peternakan

#### Pasal 27

- (1) Peternak wajib menggunakan obat hewan yang memiliki izin edar resmi.
- (2) Penggunaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan atau tenaga medik veteriner yang memiliki izin praktik di Daerah.
- (3) Peternak dilarang menyuntikkan dan/atau memberikan obat keras yang diperoleh dari transaksi daring tanpa adanya resep dan pengawasan dari otoritas veteriner Daerah.
- (4) Dinas melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan obat hewan pada lokasi usaha Peternakan guna memastikan tidak ada residu bahan kimia yang membahayakan kesehatan manusia.

## BAB VI

### KEMITRAAN

#### Pasal 28

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan dalam bidang usaha budi daya berdasarkan perjanjian secara tertulis yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar Peternak;
  - b. Peternak dan Perusahaan Peternakan;
  - c. Peternak dan perusahaan di bidang lain;
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dalam upaya membangun kemitraan yang sehat.
- (4) Setiap kemitraan yang didasarkan pada pola inti plasma wajib menginformasikan dan melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan kepada Dinas secara periodik.
- (5) Setiap kemitraan didasarkan pada perjanjian tertulis dengan paling sedikit memuat:

- a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
  - b. jaminan pemasaran;
  - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
  - e. mekanisme pembayaran.
- (6) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penyuluhan; dan/atau
  - d. proses alih teknologi.
- (7) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

## BAB VII

### PANEN, PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

#### Pasal 29

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kesejahteraan hewan, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.
- (3) Setiap produk hewan yang beredar di Daerah harus berasal dari rumah potong hewan yang bersertifikasi halal dan mempunyai Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

### Pasal 31

- (1) Pengolahan hasil peternakan dapat berupa produk pangan dan nonpangan yang berasal dari produk utama maupun sampingan usaha peternakan.
- (2) Setiap pengolahan produk hasil peternakan harus memperhatikan dan mengembangkan penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap pengolahan produk pangan hasil peternakan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam upaya pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah maupun keluar daerah dengan memperhatikan kebutuhan di Daerah.
- (6) Kegiatan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui:
  - a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan pasar produk hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
  - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik Peternak;
  - c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;
  - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan

- e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dari Peternak Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBERIAN INFORMASI HARGA TERNAK

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan informasi mengenai harga ternak dan produk hewan di Daerah.
- (2) Pemberian informasi mengenai harga ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan rata-rata harga pasar dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat mengenai harga ternak dan produk hewan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

### Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas wajib melakukan pembinaan kepada Peternak secara berkala untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan kapastias sumber daya manusia Peternak;
  - b. Pendampingan teknis; dan
  - c. Standarisasi peternakan.
- (3) Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.

- (4) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
  - a. agen penyakit hewan, vektor, reservoir penyakit hewan;
  - b. induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
  - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
  - d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup
- (5) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Otoritas Veteriner yang berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Kepatuhan terhadap perizinan berusaha dan tata ruang;
  - b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
  - c. Pengawasan peredaran pakan, obat hewan, dan bibit; serta
  - d. Pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat pembuangan limbah ternak.

## Bagian Ketiga

### Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 35

- (1) Sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peternakan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas sebagai Mediator atas permintaan salah satu pihak atau para pihak.

- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Sengketa antara Peternak dengan masyarakat sekitar terkait dampak lingkungan; atau
  - b. Sengketa antara Peternak dengan Perusahaan Mitra dalam pola kemitraan;
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai mufakat, maka dituangkan dalam berita acara secara tertulis yang ditanda tangani para pihak dan Dinas.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui:
- a. Mediasi di luar pengadilan; atau
  - b. Jalur litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN PETERNAK

#### Pasal 36

- (1) Setiap Peternak di Daerah berhak:
- a. Mendapatkan perlindungan;
  - b. Mendapatkan akses pelayanan;
  - c. Mendapatkan akses informasi;
  - d. Mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas;
  - e. Mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau permodalan;
  - f. Kebebasan berorganisasi.
- (2) Setiap Peternak di Daerah berkewajiban:
- a. Mempunyai perizinan berusaha bidang peternakan;
  - b. Menjaga kesehatan hewan;
  - c. Mengelola limbah peternakan;
  - d. Menerapkan kesejahteraan hewan;
  - e. Memberikan data yang benar atas peternakan;
  - f. Menggunakan sarana yang bermutu.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap Peternak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap produk hewan yang beredar di Daerah tidak berasal dari rumah potong hewan yang bersertifikasi halal dan tidak mempunyai Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Denda administratif;
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Peternak dan telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Ketentuan Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Peraturan Bupati sebagai bentuk peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal ...

BUPATI LAMONGAN

TTD

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TTD

MOHAMMAD NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pada dasarnya hewan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Diperlukan adanya suatu tatanan pengaturan yang secara khusus memberikan kepastian hukum dan nilai kemanfaatan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh Peternak. Termasuk diantaranya adalah dengan memberikan perlingan terhadap peternak. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan secara konstitusional yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan.

Permasalahan terkait ketahanan pangan, tentunya tidak bisa dianggap enteng. Hal ini juga terkait dengan tantangan bagi Peternak di Daerah. Perlu adanya pengaturan khusus yang memberikan dasar kepastian hukum bagi Peternak dalam kegiatan peternakan, sehingga dapat tersedia suatu produk hewan yang berkualitas dan terjamin keamanannya, kesehatannya, keutuhannya, dan kehalalannya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

Peternakan bukan sekedar tentang kandang, tetapi lebih kepada suatu sistem atau tatanan yang saling berhubungan. Memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan terhadap hewan, khususnya ternak, baik itu ruminansia ataupun nonruminansia. Kesehatan hewan juga harus terjamin, agar tidak merugikan sesama hewan bahkan juga sampai ke manusia. Hal ini sejalan dengan nilai dasar sosial-kultural masyarakat yang harus menjaga keseimbangan dengan alam.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan bidang peternakan, khususnya dalam rangka perlindungan peternak. Pengaturan ini haruslah mampu teraktualisasi secara maksimal, sehingga peran dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat lebih memberikan kepastian hukum, sekaligus dalam melindungi Peternak di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh

karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni dan oligopoli

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
    Cukup jelas

Pasal 21  
    Cukup jelas

Pasal 22  
    Cukup jelas

Pasal 23  
    Cukup jelas

Pasal 24  
    Cukup jelas

Pasal 25  
    Cukup jelas

Pasal 26  
    Cukup jelas

Pasal 27  
    Cukup jelas

Pasal 28  
    Cukup jelas

Pasal 29  
    Cukup jelas

Pasal 30  
    Cukup jelas

Pasal 31  
    Cukup jelas

Pasal 32  
    Cukup jelas

Pasal 33  
    Cukup jelas

Pasal 34  
    Cukup jelas

Pasal 35  
    Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ...